

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Sebelum Belanda berhasil menghapuskan sistem kesultanan di Aceh pada 1903, kehidupan di Aceh dipengaruhi oleh Sultan, Ulama dan Uleebalang.¹ Ketiga unsur ini saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Di dalam menjalankan kekuasaannya, Sultan memerlukan kaum Ulama dan Uleebalang sebagai penghubung dirinya yang bermukim dipuncak struktur dengan rakyat biasa yang berada di struktur bawah.² Di lain pihak, Uleebalang dan Ulama juga memerlukan kehadiran sang Sultan. Bagi para Uleebalang, Sultan merupakan sumber kekuatan mereka melalui pengakuan dan pengesahan yang diberikannya. Sedangkan untuk para Ulama, mereka memerlukan sosok Sultan untuk melindungi diri dan kepentingan mereka. Ulama membutuhkan Sultan untuk menjamin kebebasan mereka dalam usaha menyebarkan ajaran agama tanpa dibatasi oleh wilayah-wilayah kekuasaan Uleebalang. Bahkan dengan adanya bantuan dari Sultan, para Ulama dapat mengharapkan pula kerjasama dari para Uleebalang yang menguasai wilayah-wilayah tempat mereka menyebarkan agama. Namun keharmonisan itu terganggu dengan datangnya pemerintah kolonial Belanda yang mencoba menguasai Aceh pada 1873

¹ Ulama merupakan para ahli ilmu/para ahli pengetahuan, sedangkan Uleebalang adalah suatu kelompok adat yang diangkat oleh Sultan untuk mengepalai suatu daerah otonom yang disebut Nangro/Negeri. Ismuha, *Ulama dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LEKNAS-LIPI, 1976, hlm.1.

² Nazaruddin Sjamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945—1949*. Jakarta: UI Press, 1999, hlm. 2.

dan berhasil menghapuskan sistem kesultanan di Aceh pada 1903 dengan menurunkan Sultan Aceh yang terakhir yaitu Muhammad Daud Syah II.³

Pada 5 Mei 1939, Ulama Aceh mengadakan musyawarah di Matang Glumpangdua, Bireuen. Musyawarah yang diprakarsai oleh tiga Ulama terkemuka di Aceh yakni Teungku Abdur Rahman, Teungku Muhammad Daud Beureu'eh dan Teungku Ismail Yakub ini menghasilkan keputusan untuk membentuk suatu organisasi antar Ulama yang dinamakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Untuk memimpin PUSA, ditunjuklah Teungku Muhammad Daud Beureu'eh sebagai Ketua Umum. Adapun maksud dan tujuan awal didirikannya PUSA menurut Teungku Ismail Yakub adalah sebagai berikut:⁴

1. Untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syi'ar Islam yang suci, terutama di tanah Aceh yang pernah digelar dengan Serambi Mekkah pada masa keemasannya yang telah lalu sampai sekarang, telah berubah menjadi satu negeri yang amat ketinggalan dari tetangga-tetangganya yang berdekatan, apalagi yang berjauhan, dan sudah demikian lamanya terbenam, dalam lembah kejahilan dan kegelapan.
2. Hendak berusaha sedapat tenaga buat mempersatukan faham ulama-ulama Aceh tentang menerangkan hukum-hukum di mana mungkin, karena menurut yang telah dialami pada masa-masa yang telah lampau, pertikaian faham antara ulama-ulama kita, sering juga membawa kepada akibat yang tidak diinginkan oleh kita semua, begitu juga pertikaian faham itu adalah, menjadi batu penggelincirkan langkah kemajuan Islam yang suci.
3. Berusaha memperbaiki dan mempersatukan rencana pelajaran sekolah-sekolah agama di seluruh tanah Aceh.

Pada 8 Desember 1942, Jepang masuk ke Aceh sebagai saudara tua yang ingin menjalin hubungan dengan rakyat Aceh, khususnya golongan Ulama yang tergabung dalam PUSA, sehingga kedatangan Jepang disambut dengan baik oleh rakyat Aceh.⁵

³ *Ibid.*, hlm. 4, lihat juga Tim Monografi Daerah Istimewa Aceh, *Monografi Daerah Istimewa Aceh. Proyek Pengembangan Media Kebudayaan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976, hlm. 16.

⁴ Ismuha, *op. cit.*, hlm. 49.

⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

Jepang juga membantu mengusir Belanda dari Aceh dan melancarkan propaganda-propagandanya yang menyatakan bahwa Jepang datang untuk membebaskan rakyat Aceh dari penjajahan bangsa Barat.⁶

Pada masa awal pendudukan Jepang, mereka mengikuti prinsip-prinsip pemerintahan panjajahan Belanda yaitu menjaga keamanan dan ketertiban melalui uleebalang serta membatasi kegiatan ulama pada bidang keagamaan saja. Namun, kepercayaan rakyat Aceh terhadap Jepang tidak berlangsung lama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perlawanan rakyat terhadap Jepang yang mulai memperlihatkan kesewenangannya seperti melarang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain itu, adanya pemaksaan melakukan *seikeirei* juga membuat rakyat Aceh menjadi semakin membenci Jepang.⁷

Pada 1945 tentara Jepang menyerah kepada sekutu. Walaupun Jepang menutup-nutupi kenyataan bahwa mereka kalah terhadap sekutu, akhirnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai juga di Aceh. Setelah berita proklamasi sampai di Aceh, Teuku Nyak Arief, seorang tokoh Aceh mengelilingi kota Kutaraja dengan mengendarai mobilnya yang telah dipasang bendera merah putih. Tindakan ini dilakukannya agar rakyat Aceh yakin bahwa Indonesia telah merdeka. Pada 25 Agustus 1945, Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) ikut serta merayakannya dengan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Seikeirei* merupakan suatu cara menghormati Tenno/Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah matahari terbit/bertentangan dengan arah kiblat. Hal ini ditentang oleh golongan Ulama karena dianggap termasuk ke dalam perbuatan syirik (menyekutukan Tuhan).

merebut kantor Atjeh Sinbun.⁸ Berikutnya pemuda-pemuda dari berbagai kota seperti Langsa, Lhokseumawe, Sigli, Bireuen, Lhoksukon, Kuala Simpang, Kutacane, Meulaboh dan Tapak Tuan pun turut merayakan kemerdekaan Indonesia. Aksi perayaan dilakukan secara besar-besaran oleh masyarakat Aceh. Sebagai Upaya untuk meredam tindakan-tindakan yang dikhawatirkan akan mengarah anarki, maka pada 27 Agustus 1945 tokoh-tokoh pemuda mantan *Gyugun* (seperti tentara PETA di Jawa) mengadakan pertemuan yang menghasilkan suatu kesepakatan membentuk suatu organisasi militer untuk menjaga keamanan.⁹

Pada awal kemerdekaan Indonesia, di Aceh banyak bermunculan organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang militer. Salah satu diantaranya adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API). API dibentuk pada 27 Agustus 1945 oleh para mantan perwira *Gyugun*, diantaranya Sjamaun Gaharu dan Teuku Hamid Azwar.¹⁰ Dalam proses pembentukannya, ada perbedaan pandangan di dalam tubuh API ini yang berujung pada kekecewaan di pihak PUSA. Perbedaan Pandangan ini diawali oleh anjuran Teuku Nyak Arief selaku Residen Aceh, yang menyatakan agar API disusun berdasarkan pengetahuan pendidikan dan pengalaman dalam bidang kemiliteran.¹¹ Oleh karena itu ia menetapkan hanya para perwira *Gyugun* yang terlatih baik yang

⁸ Mohammad Iskandar, dkk., *Peranan Elit Agama pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 85.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ TKG. AK. Jakobi, *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945 – 1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Bekerjasama dengan Yayasan “SEULAWAH RI-001”, 1998, hlm. 132.

¹¹ Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 100.

dipilih untuk menjadi perwira inti dalam organisasi militer Republik di Aceh.¹² Anjuran ini menyebabkan diisinya pos-pos penting dalam API oleh mantan *Gyugun* yang berasal dari keluarga Uleebalang. Kenyataan ini berbeda dengan pandangan golongan pemuda yang berasal dari PUSA yang menyatakan bahwa yang terpenting bukanlah pendidikan atau pengalaman militer, melainkan kepribadian yang utuh, semangat yang menyala-nyala, pandangan revolusioner serta solidaritas yang tinggi.¹³ Alasan lain Ulama tidak setuju dengan masuknya Uleebalang ke dalam API adalah masih adanya kecurigaan terhadap Uleebalang yang dikhawatirkan masih mengharapkan bekerjasama kembali dengan Belanda sehingga nantinya hanya akan merugikan API. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan terjadinya perang Cumbok pada masa awal kemerdekaan.

Perang Cumbok terjadi antara kaum Ulama dan Uleebalang yang dimulai pada Oktober 1945.¹⁴ Perang ini dilatarbelakangi oleh perasaan saling tidak suka dan perebutan kekuasaan antara kedua kaum tersebut. Dinamakan perang Cumbok karena kaum Uleebalang yang berperan disini dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud yang mengepalai kecamatan Cumbok Kabupaten Aceh Utara, sehingga dikenal sebagai Teuku Cumbok. Dia dikenal sebagai pribadi yang berwatak keras dan tidak menaruh hormat terhadap kaum ulama. Teuku Cumbok juga tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Dia beranggapan bahwa Indonesia belum siap untuk merdeka. Teuku Cumbok pun membentuk suatu perkumpulan Uleebalang yang dinamakan Markas

¹² *Ibid.*

¹³ Mohammad Iskandar, dkk., *op. cit.*, hlm. 90.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

Uleebalang pada 22 Oktober 1945 yang merupakan perkumpulan untuk membasmi para penghalang mereka dalam memperoleh kekuasaan.¹⁵ Organisasi ini awalnya didasarkan untuk perlindungan akan berbagai ancaman yang diduga akan muncul terhadap Uleebalang. Namun pada kenyataannya, Markas Uleebalang ini berlaku sewenang-wenang dengan menguasai kota Sigli dan melakukan pengawasan terhadap arus orang-orang yang keluar masuk ke kota tersebut. Mereka juga melakukan aksi pencarian dan penangkapan terhadap orang-orang yang dianggapnya sebagai pihak yang menentang Uleebalang. Aksi Markas Uleebalang ini membuat rakyat tidak nyaman dan menderita. Selanjutnya rakyat bersama PUSA membentuk Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) pada 22 Desember 1945 di Garot.¹⁶ Inti dari pendirian MBRU ini adalah untuk melawan kekuatan Markas Uleebalang dan pendukungnya yang dianggap sudah bertindak semena-mena.

Pertentangan antara Ulama dan Uleebalang semakin membesar pada saat berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia tiba di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari sikap seorang Uleebalang Cumbok yang bernama Teuku Abdullah Titeue yang tidak bersedia menerima tugas dan jabatan dari Angkatan Perang Indonesia (cikal bakal Tentara Nasional Indonesia) sebagai wujud ketidakpercayaannya pada berita proklamasi kemerdekaan Indonesia.¹⁷

Pemerintah pusat pun turun tangan dengan memberikan ultimatum agar Uleebalang menghentikan aksi sepihaknya, jika tidak mereka akan dikenakan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁷ TGK. A.K. Jakobi, *op. cit.*, hlm. 304.

hukuman, namun ultimatum ini tidak juga digubris. Akhirnya pada 10 Januari 1946, penyerangan terhadap Markas Uleebalang oleh PUSA yang didukung oleh pemerintah pusat pun terjadi dan sehari setelahnya benteng pusat kekuatan Markas Uleebalang berhasil dikuasai.¹⁸ Praktis setelah penyerangan itu kekuatan Uleebalang hancur dan Teuku Cumbok yang melarikan diri bersama pengikutnya yang masih tersisa berhasil ditangkap pada 16 Januari 1946.¹⁹

Pada 1946, PUSA mempunyai kekuasaan politik yang besar di Aceh. Bahkan, Teungku Daud Beureu'eh, Ketua PUSA, diangkat menjadi Gubernur Militer dengan pangkat Jenderal Mayor.²⁰ Pada masa ini banyak diceritakan tentang Teungku Muhammad Daud Beureu'eh. Mengingat peran dasarnya sebagai seorang Ulama, dia cenderung mendekati rakyat melalui bidang agama. Hal ini diperlihatkannya dengan mendirikan cabang Masyumi di Kutaraja pada tanggal 26 Maret 1946.²¹ Pada masa ini juga terdapat gerakan oposisi rezim PUSA, yaitu yang dikenal sebagai Gerakan Sayid Ali yang dipimpin oleh Sayid Ali Al Sagaf.²² Gerakan ini didasarkan pada anggapan adanya praktik korupsi di kalangan rezim PUSA. Daud Beureu'eh sukses dalam menjalankan perannya sebagai Gubernur Aceh pada akhir tahun 1949.²³ Daud Beureueh dianggap mempunyai taktik yang jitu dalam menghadapi lawan politiknya. Sebagai contoh adalah dalam mengatasi Gerakan Sayid Ali, Daud Beureu'eh tetap teguh akan pendiriannya dan tidak terbujuk akan hasutan orang-orang dari kelompok

¹⁸ Mohammad Iskandar, dkk., *op. cit.*, hlm. 101.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

²⁰ Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 218.

²¹ *Ibid.*, hlm. 213.

²² *Ibid.*, hlm. 226.

²³ *Ibid.*, hlm. 268 – 269.

gerakan Sayid Ali yang memintanya untuk menghukum pejabat-pejabat dari rezim PUSA yang dituduh korupsi. Disini terlihat jelas bahwa Daud Beureu'eh tahu dengan persis kepada siapa atau kelompok mana ia harus berpihak dan bagaimana ia bertindak.

Alasan penulis untuk melakukan penelitian tentang PUSA adalah dikarenakan konsentrasi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia kebanyakan dititikberatkan pada daerah Jawa. Penulis merasa perjuangan kemerdekaan di daerah Aceh yang dimotori oleh organisasi Ulama (PUSA) ini tidak kalah pentingnya apabila dibandingkan dengan yang terjadi di Jawa.

Penelitian yang mengambil kurun waktu pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia di Aceh sebenarnya sudah pernah dilakukan, diantaranya adalah skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia dengan judul “Konflik Uleebalang dan Ulama dalam Revolusi Sosial Desember 1945 – Maret 1946 di Aceh Besar” yang ditulis pada tahun 1995 oleh Cut Zulia Djohan. Akan tetapi, penelitian ini hanya menitikberatkan pada pertentangan antara Ulama dengan Uleebalang yang berujung pada terjadinya Perang Cumbok. Selain skripsi tersebut, ada juga penelitian yang berupa tesis. Tesis tersebut merupakan tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia yang ditulis pada tahun 1995 oleh Zulfan. Tesis ini berjudul “Kelompok Pengusaha pada Masa Perang Kemerdekaan di Aceh (1945 – 1949)”. Tesis ini menitikberatkan penelitiannya pada kelompok pengusaha yang pengaruhnya lebih kecil jika dibandingkan dengan PUSA.

I. 2. Perumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah peranan PUSA pada masa revolusi 1945 – 1949. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya PUSA?
2. Bagaimana peran dan kedudukan PUSA sebelum revolusi kemerdekaan Indonesia?
3. Mengapa PUSA mendapat dukungan rakyat Aceh pada awal kemerdekaan?
4. Bagaimana peran PUSA dalam revolusi kemerdekaan Indonesia?

I. 3. Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan sejarah, dikenal beberapa batasan untuk mengkaji suatu permasalahan. Batasan-batasan ini terdiri dari segi spasial (ruang) dan temporal (waktu). Berikut adalah penjelasan dari segi-segi tersebut;

Dari segi spasial (ruang), fokus penelitian ditujukan di daerah Aceh. Hal ini dikarenakan organisasi yang akan saya teliti berdiri dan bergerak di Aceh. Selanjutnya adalah segi temporal atau waktunya. Dari segi ini, penelitian membahas periode 1945 – 1949, yang merupakan masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, PUSA sebagai bagian dari rakyat Aceh dihadapkan pada peristiwa kemerdekaan Indonesia yang mengharuskan Aceh untuk meleburkan diri kedalamnya dan menghadapi berbagai permasalahan yang muncul seperti adanya Uleebalang yang tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia ataupun Belanda yang ingin kembali

menduduki Aceh. Akhirnya dari segi tematis, penulis membatasi pada peranan ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia.

I. 4. Tujuan Penelitian

Bertitiktolak dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan-persoalan yang menyangkut PUSA pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia (1945 – 1949). Persoalan-persoalan itu mencakup kegiatan yang dilakukan PUSA dalam bidang sosial maupun politik. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk melengkapi penulisan-penulisan yang telah ada sebelumnya tentang sejarah Aceh yang berkaitan dengan Ulama.

I. 5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan sejarah. Metode ini terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan terakhir historiografi. Langkah pertama yang penulis lakukan adalah menemukan subjek yang akan diteliti terlebih dahulu, setelah itu mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan PUSA. Dalam melakukan heuristik, penulis antara lain menemukan surat kabar *Pewartu Deli* tanggal 17 Mei dan 14 Juni 1939 yang berisikan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUSA serta majalah *Sinar Darussalam*, th.II no.14 dan 15, Juli 1969 yang berisikan mengenai struktur

kepengurusan awal PUSA. Surat kabar dan majalah tersebut penulis dapatkan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tahapan berikutnya adalah kritik yang terdiri dari kritik intern dan ekstern. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan berbagai materi yang telah dikumpulkan untuk menentukan kredibilitas sumber tersebut. Sebagai contohnya adalah penulis mendapatkan sumber-sumber berupa buku yang berisikan mengenai Ulama Aceh pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945 – 1949. Sedangkan untuk kasus kritik ekstern penulis melakukannya dengan membubuhkan tanda [*sic!*] diakhir kata yang tidak sesuai dengan ejaan kata pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945 – 1949.

Tahap ketiga yang penulis lakukan adalah melakukan penafsiran terhadap fakta yang ditemukan dalam sumber-sumber yang berkaitan dengan PUSA. Tahap ini disebut juga dengan interpretasi. Segala penilaian penulis lakukan berdasarkan pada berbagai sumber yang telah dikritik sebelumnya.

Tahap terakhir dari metode sejarah ini adalah historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap ini penulis akan memadukan segala sumber yang telah penulis dapatkan ke dalam suatu penulisan tentang PUSA pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia yang disusun secara sistematis.

I. 6. Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis sumber yang biasa digunakan dalam penulisan sejarah, yaitu sumber primer dan sekunder. Sebagai

sumber primer, penulis menggunakan artikel yang berjudul “Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Aceh 30 Tahun yang Lalu” yang terdapat dalam majalah *Sinar Darussalam* no.14 dan 15 tahun 1969. Walaupun diterbitkan pada tahun 1969, namun penulis artikel ini adalah mantan Sekretaris II Pengurus Besar PUSA yang bernama Ismuha yang sudah pasti ikut dalam berbagai kegiatan yang dilakukan PUSA pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945 – 1949. Sedangkan sebagai sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hasil penelitian tentang Aceh yang telah dilakukan sebelumnya, khususnya mengenai Ulama Aceh.

Buku yang membahas tentang Ulama Aceh diantaranya adalah buku karangan Ismuha yang berjudul *Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah*. Adapun buku yang membahas tentang Aceh secara umum salah satunya adalah buku karangan Mohammad Said yang berjudul *aceh Sepanjang Abad*. Lalu buku yang membahas mengenai kondisi Aceh pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia antara lain; buku karangan TGK. AK. Jakobi yang berjudul *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945 – 1949: dan Peranan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang* dan buku karangan Nazaruddin Sjamsuddin yang berjudul *Revolusi di Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945 – 1949*. Ada juga buku *Atjeh Sepintas Lalu* karangan Insider. Di dalam buku ini terdapat peranan PUSA dalam bidang politik yang menyatakan bahwa segala sesuatu mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Aceh berlangsung menurut keinginan PUSA dikarenakan sebagian besar anggota PUSA masuk ke dalam susunan Komite Nasional Daerah Aceh. Buku-buku ini penulis dapatkan di Perpustakaan Fakultas Ilmu

Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia.

I. 7. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Persatuan Ulama Seluruh Aceh pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945 – 1949” ini akan dibagi ke dalam lima bab dan beberapa sub-bab. Bab pertama menguraikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua menguraikan tentang gambaran umum Aceh pada masa kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya akan dibahas mengenai situasi dan kondisi rakyat Aceh dalam menyambut berita kemerdekaan Indonesia. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang perubahan struktur pemerintahan, dari struktur pemerintahan kolonial menjadi struktur pemerintahan Indonesia.

Bab tiga menguraikan tentang situasi berdiri atau terbentuknya PUSA. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai maksud dan tujuan berdirinya PUSA. Selanjutnya juga diuraikan berbagai kegiatan PUSA pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang.

Bab empat menguraikan tentang peranan PUSA pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kegiatan PUSA dalam bidang politik, sosial dan agama.

Bab lima merupakan suatu kesimpulan yang berfungsi sebagai suatu penutup dari seluruh kronologi kejadian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

I. 8. Ejaan Yang Digunakan

Ejaan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Dalam penulisan ini terdapat kata-kata seperti nama atau istilah yang dipertahankan keasliannya sesuai dengan yang tertulis di dalam sumber penelitian seperti nama orang dan tempat.

